



Dukung Pembangunan Mahulu, ITN Malang adakan Workshop Penyelenggaraan dan Retribusi Bangunan Gedung

Rektor ITN Malang Awan Uji Krismanto, ST., MT., Ph.D., berkalung syal batik Mahulu, bersebelahan dengan Wakil Ketua I DPRD Mahulu, Tiopilus Hanye, S.A.B., M.Si, (baju batik) foto bersama dengan Tim Peserta workshop. (Yanuar/Humas ITN Malang)

Malang, ITN.AC.ID – Mendukung pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu, Institut Teknologi Nasional Malang (ITN Malang) melakukan pendampingan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang bangunan gedung dan peraturan bupati tentang retribusi gedung. Pada implementasi regulasi ITN Malang memfasilitasi Pemkab Mahakam Ulu dengan menyelenggarakan *Workshop Penyelenggaraan dan Retribusi Bangunan Gedung*, di Ruang Amphi Kampus 2 ITN Malang, Senin (04/9/2023).

Workshop yang dibuka oleh Rektor ITN Malang Awan Uji Krismanto, ST., MT., Ph.D., ini diikuti kurang lebih 30 peserta terdiri dari unsur anggota DPRD dan OPD Teknis Pemkab Mahakam Ulu. Hadir pula Wakil Ketua I DPRD Mahulu, Tiopilus Hanye, S.A.B., M.Si, dan narasumber dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(PUPR)., Alfi Syahriana Anshar, SST., MT, dan Winni Sharfina, ST., MT.

Rektor menyampaikan, Kabupaten Mahulu banyak memiliki potensi daerah yang bisa dikembangkan dan dioptimalkan yang hilirnya berguna untuk pemberdayaan masyarakat dan perekonomian. Melalui kerja sama ini tim dosen dan mahasiswa ITN Malang bisa mendukung percepatan pembangunan di Mahulu. ITN Malang sebagai perguruan tinggi berbasis teknologi di Jawa Timur memiliki komitmen yang sangat tegas, dan konsisten dalam pengembangan dan implementasi teknologi untuk kemajuan bagi kabupaten dan pemberdayaan masyarakat.

“Ada baiknya perkembangan mulai dari awal diarahkan dengan tepat. Sehingga nantinya perkembangan Mahulu lebih terarah dan optimal. Mengingatkan beberapa kota di Jawa sudah tidak bisa dikembangkan karena dari awal perencanaannya mungkin tidak tepat,” ujar rektor.

Rektor berharap kerja sama tersebut bisa dikembangkan lebih lanjut terutama pada pengembangan sumber daya manusia di Mahulu. Saat ini ITN Malang telah beberapa kali menerima mahasiswa baru dari Mahakam Ulu. Kedepannya bisa ditingkatkan tidak hanya untuk mahasiswa baru dari SMA/SMK, tapi juga untuk jenjang magister sebagai peningkatan kompetensi dan kapasitas ASN di Mahulu.

Baca juga : [ITN Malang Bantu Mahakam Ulu Wujudkan Pembangunan Berbasis Green Energy](#)

“Kerja sama ini nantinya bisa diwujudkan secara berkelanjutan. Kami berkomitmen menyediakan SDM baik dosen maupun mahasiswa untuk membantu pembangunan dan peningkatan infrastruktur di Mahulu,” tuntasnya.

Sementara Wakil Ketua I DPRD Mahulu, Tiopilus Hanye, S.A.B., M.Si, mengatakan, DPRD sebagai lembaga representasi dari masyarakat Mahulu memiliki bertanggung jawab terhadap regulasi

penyelenggaraan dan retribusi bangunan gedung yang memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat. Harapannya program pembangunan yang dilakukan mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.



Rektor ITN Malang Awan Uji Krismanto, ST., MT., Ph.D., (kiri) memberikan cendera mata kepada Wakil Ketua I DPRD Mahulu, Tiopilus Hanye, S.A.B., M.Si. (Yanuar/Humas ITN Malang)

“Kami di DPRD bertanggung jawab besar terhadap regulasi yang bertujuan melindungi masyarakat, memberikan rasa aman pada suatu program pembangunan. Sebagai fungsi legislasi yang dimiliki DPRD, maka kami harus membuat peraturan pemerintah yang disesuaikan dengan tata ruang dan tata wilayah Mahakam Ulu,” ujarnya.

Dikatakan Tiopilus, penyelenggaraan pembangunan gedung sudah sepatutnya dilaksanakan sebagai daya dukung lingkungan hidup sesuai dengan keadaan dan kehidupan masyarakat Mahulu. Dengan

tidak mengesampingkan topografi lahan, kondisi tanah, ketersediaan SDM, serta potensi bencana. Oleh karena itu, hal yang patut diperhatikan dalam hal tertib bangunan adalah keselamatan bangunan, ini menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

“Sesuai slogan berbudaya yang dianut di Mahulu, penyelenggaraan pembangunan gedung harus mempertimbangkan kearifan lokal atau adat istiadat yang merupakan harta yang tidak ternilai bagi Mahakam Ulu sebagai kabupaten yang Berbudaya. Untuk itu DPRD berharap pembangunan gedung termasuk rumah tinggal dilaksanakan sesuai karakter Mahalu,” jelasnya.

Tiopilus mengingatkan, workshop sebagai ajang diskusi, dan tukar pikiran harus dapat merumuskan suatu kebijakan terbitnya peraturan daerah dan surat edaran terkait penyelenggaraan dan retribusi bangunan gedung.

Baca juga : [Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang Ikuti Bimtek Kontrol Kualitas Bahan Beton di ITN Malang](#)

Ardiyanto Maksimilianus Gai, ST., MSi., Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ITN Malang menambahkan, tahun ini ITN Malang juga mendapat kepercayaan dalam hal penyusunan tata ruang, perancangan pusat perkantoran, peraturan bangunan gedung, rencana induk penyediaan air minum, penilaian Nilai Jual objek Pajak (NJOP), serta pengembangan energi baru terbarukan.

“Kami (LPPM) dalam kerja sama berusaha mengoptimalkan SDM yang ada di ITN. Semua kompetensi kemampuan kami dorong untuk mensupport,” katanya. (Mita Erminasari/Humas ITN Malang)